

## **INKLUSIFITAS SEKTOR PERIKANAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **Inclusiveness of The Fisheries Sector in Sustainable Development in South**

Anna Heirina<sup>1\*</sup>, Ayub<sup>2</sup>

1 Program Studi Ilmu Perikanan, Fakultas Ilmu Tanaman dan Hewani, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau, 36125, Sumatera Selatan, Indonesia

2 Jurusan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, 16144, Bogor Indonesia

\*Korespondensi email : [anna@univbinainsan.ac.id](mailto:anna@univbinainsan.ac.id)

(Received 11 Mei 2023; Accepted 25 Juni 2023)

#### **ABSTRAK**

Sektor perikanan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan sektor unggulan. Sektor tersebut selain memberikan sumber bahan pangan yaitu protein hewani, juga memberikan lapangan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran sektor perikanan dalam struktur perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya untuk melihat inklusifitas antara Nilai Tukar Petani (NTP) khusus sektor perikanan dilihat hubungannya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) khususnya sektor perikanan, serta nilai inflasi. Metode yang digunakan untuk melihat peran sektor perikanan dalam perekonomian menggunakan analisis deskriptif. Sedangkan, untuk melihat hubungan antara NTP, inflasi, dan PDRB dengan metode statistik yaitu korelasi bivariante pearson. Berdasarkan hasil penelitian, dihasilkan bahwa PDRB sektor perikanan menyumbang 2,90% pada PDRB total Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat korelasi yang signifikan pada inflasi dan PDRB sektor perikanan.

Kata Kunci: Bivariate Pearson, Nilai Tukar Petani, PDRB, Perikanan.

#### **ABSTRACT**

The fisheries sector in South Sumatra Province is the leading sector. This sector in addition to providing a source of food, namely animal protein, also provides employment. This study aims to examine the role of the fishery sector in the economic structure of South Sumatra Province. Furthermore, to see the inclusiveness between the Farmer's Exchange Rate (NTP) specifically for the fishery sector, it is seen its relationship with Gross Domestic Product (GDP) especially in the fishery sector, as well as the inflation rate. The method used to see the role of the fisheries sector in the economy uses descriptive analysis. Meanwhile, the statistical method is the bivariate pearson correlation to see the relationship between NTP, inflation, and GDP. Based on the results of the study, it was found that the GDP of the fisheries sector contributed 2.90% to the total GDP of the Province of South Sumatra. There is a significant correlation between inflation and GDP in the fisheries sector.

Keywords: Bivariate Pearson, Farmer's Exchange Rate; GDP, Fisheries

## PENDAHULUAN

Sektor perikanan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan sektor unggulan. Sektor tersebut selain memberikan bahan pangan yaitu protein hewani, juga memberikan lapangan pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan (KKP, 2020). Sumatera Selatan memiliki wilayah perairan yang luas, dengan wilayah perairan sekitar 2,5% juta ha, yang terdiri 9% kuala, 12% danau, 33% sungai, dan 46% (Sumantriyadi, 2014).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dalam perencanaan pembangunan. Indikator yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dihitung dari persentase peningkatan PDRB dan mencerminkan pendapatan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Namun, pertumbuhan yang berorientasi pada output ternyata menghasilkan kondisi kemiskinan, deprivasi, dan eksklusi sosial. Oleh karena itu perlu dibangun kerangka pembangunan yang inklusif.

Kerangka pembangunan inklusif yang berkeadilan untuk peningkatan akses bagi masyarakat sejalan dengan upaya pemerintah yang tertuang pada Rencana Jangka Menengah Nasional tahun 2015–2019 (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2015). Pola pertumbuhan inklusif memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik. Lenoir (1974), konsep pembangunan inklusif termasuk komitmen untuk mendorong pertumbuhan dengan melibatkan masyarakat sehingga diharapkan manfaat yang lebih besar dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang lebih luas. Istilah pembangunan inklusif tidak terbatas pada aspek ekonomi saja, tetapi lebih luas untuk menyediakan akses keelemen masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan, antara lain: layanan dasar dan infrastruktur.

Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran yang dilaksanakan dalam tataniaga perikanan. Hal tersebut didukung dengan, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa tujuan utama pengelolaan perikanan adalah meningkatkan taraf hidup pembudidaya ikan dan nelayan kecil, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja. Pengelolaan sumber daya perikanan dalam rangka menjaga kesinambungan sumber daya perikanan sangat penting untuk terus dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan semangat SDGs yang terus digaungkan yaitu agar generasi yang akan datang tetap dapat menikmati manfaat sumberdaya perikanan.

Secara langsung konsep inklusifitas pada sektor perikanan sudah dimasukkan ke dalam Sustainable Development Goal (SDGs). Kementerian PPN, (2017) setidaknya terdapat dua Goal/Tujuan pada tujuan kedua belas dan keempat belas, yaitu: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Konsumsi dan produksi haruslah terjadi secara seimbang, untuk menghindari ketimpangan. Mengkonservasi dan memanfaatkan kekayaan laut, samudera dan maritim secara berkelanjutan. Segala sumber daya alam yang tersedia baik di daratan dan di lautan memiliki nilai positif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan melihat peran sektor perikanan dalam struktur perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari pembentukan PDRB. Selanjutnya untuk melihat inklusifitasnya, lalu dilihat hubungan anatara Nilai Tukar Petani (NTP) khusus sektor perikanan dengan PDRB khususnya sektor perikanan. Selain sebagai penyumbang dalam pembentukan PDRB di Provinsi Sumatera Selatan, sektor perikanan juga berperan dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja.

## METODE PENELITIAN

### Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret–April 2022. Lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Selatan.

### Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laptop yang dilengkapi dengan program SPSS, microsoft word dan excel. Bahan yang digunakan adalah data administrasi provinsi, nilai tukar petani (NTP) khusus sektor perikanan, dan produk domestic regional bruto (PDRB) khusus sektor perikanan.

### Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis statistik. Secara garis besar penelitian ini terdapat dua tahapan yaitu:

#### Pengumpulan dan Analisis Data

Tahap pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan pada penelitian. Tahap analisis data digunakan untuk mempelajari data yang ada, sehingga mengetahui *trend* yang terjadi.

#### Korelasi NTP dengan PDRB

Analisis statistik digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara indeks NTP dengan alih PDRB Analisis statistik yang digunakan yaitu korelasi bivariate pearson. Nilai tukar petani dapat dihitung dengan Persamaan 1.

$$NTP = \frac{IT}{IB} \times 100$$

Keterangan:

IT= Indeks harga yang diterima petani

IB= Indeks harga yang dibayar petani

## HASIL

### Peran Sektor Perikanan

PDRB sektor perikanan di Sumatera Selatan dari tahun 2018–2021 (Tabel 1), memiliki tren yang baik. Kenaikan yang terjadi dari selama empat tahun tersebut mencapai ±1.000 miliar rupiah, tentu nilai tersebut adalah peningkatan yang kecil. Peningkatan yang diberikan oleh sektor perikanan seharusnya diimbangi oleh perhatian pemerintah kepada sektor perikanan. PDRB sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap sektor pertanian secara luas hingga 17%, sedangkan secara umum memberikan sumbangan hampir 3% terhadap PDRB Sumatera Selatan.

Tabel 1. PDRB Sumatera Selatan Tahun 2018–2021

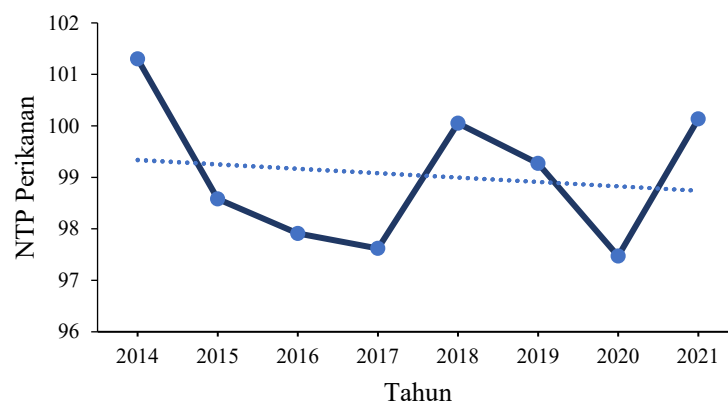
Lapangan Usaha per Sub Kategori	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 per Sub Kategori (Miliar Rupiah)			
	2021	2020	2019	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	54.834,53	53.281,53	52.366,83	50.674,28
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	39.746,86	38.528,31	37.937,62	37.054,97
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	5.613,87	5.612,68	5.216,25	5.146,68
3. Perikanan	9.473,8	9.140,53	9.212,96	8.472,63
B. Selain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	271.573,4	261.847,69	263.097,92	247.809,79
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	326.407,93	315.129,22	315.464,75	298.484,07
<b>Kontribusi terhadap PDRB</b>	<b>Persen (%)</b>			
Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB Total	2,90	2,90	2,92	2,84
Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,28	17,16	17,59	16,72

Diolah Dari data (BPS, 2022)

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kontribusi sektor perikanan. Fauzi (2010) mengemukakan bahwa sektor perikanan di beberapa negara maju di dunia telah menjadi sumber utama peningkatan pertumbuhan ekonomi regional. Di Indonesia, sektor perikanan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan perhatian lebih dari pemerintah. Adapun dukungan dari pemerintah dapat melalui kebijakan fiskal dan non fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama nelayan (Samosir, 2014).

### **Korelasi antara NTP, PDRB, dan Inflasi**

Terdapat hubungan signifikan pada inflasi dan PDRB sektor Perikanan dengan sawah ditunjukkan dengan nilai sig. 0,005. Sedangkan, hubungan yang tidak signifikan pada NTP sektor perikanan dengan PDRB sektor Perikanan sig. 0,343 (Tabel 2). Hal tersebut seperti disampaikan oleh Field (2009) dan Marshelia *et al* (2017) jika nilai Sig. (2-tailed) <0,05 berarti terdapat korelasi yang signifikan. Hasil analisis korelasi antara NTP Perikanan dengan Inflasi adalah 0.443 hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara nilai tersebut (Gambar 1). Korelasi tersebut berlaku berkebalikan. Korelasi hanya diperlihatkan pada nilai PDRB sektor Perikanan terhadap Inflasi. Sedangkan NTP Perikanan nilainya tidak berkorelasi dengan PDRB sektor perikanan atau pun dengan NTP Perikanan.



Gambar 1. Perubahan NTP Sektor Perikanan dari Tahun 2014–2021

Nilai tukar petani secara umum, termasuk perikanan di dalamnya merupakan perbandingan antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani (Nirmala *et al.*, 2016). Nilai tukar petani yang menurun dapat membuat petani tidak memiliki daya beli. Faktor yang menyebabkan rendahnya NTP adalah mahalnya harga produksi disektor perikanan itu sendiri. Sehingga sangat perlu diperhatikan sarana produksi dari para pelaku sektor perikanan.

Table 1. Tabel Korelasi antara NTP, PDRB, dan Inflasi

		NTP Perikanan	Inflasi	PDRB Perikanan
<b>NTP Perikanan</b>	Pearson Correlation	1	0,349	-0,424
	Sig. (2-tailed)		0,443	0,343
	N	7	7	7
<b>Inflasi</b>	Pearson Correlation	0,349	1	-0,903**
	Sig. (2-tailed)	0,443		0,005
	N	7	7	7
<b>PDRB Perikanan</b>	Pearson Correlation	-0,424	-0,903**	1
	Sig. (2-tailed)	0,343	0,005	
	N	7	7	7

\*\* . Korelasi signifikan di 0,01 level (2-tailed).

### Inklusifitas Pembangunan Perikanan

Hasoloan (2019) Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah model pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan individu. Secara garis besar adalah sebagai pertumbuhan produktivitas ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat. Sholihah (2014) investasi dalam rangka menciptakan kapital baru, maka dapat meningkatkan produktivitas dan akhirnya dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Akan tetapi, hal ini akan terjadi jika investasi yang diberikan bersifat padat karya atau dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sektor perikanan. Secara lebih luas, pembangunan ekonomi yang inklusif di sektor perikanan akan menekan kesenjangan ekonomi antar masyarakat.

Masyarakat yang mendapatkan akses yang sama terhadap sumber investasi dan sumberdaya, maka akan lebih memiliki peningkatan pendapatan. Sektor perikanan di Sumatera Selatan saat ini mampu menunjang pertumbuhan ekonomi daerah baik berasal dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Menurut Septifitri (2010) beberapa komoditi unggulan perikanan tangkap di Sumatera Selatan yakni udang, kepiting, manyung dan golok-golok masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Sektor perikanan budidaya memiliki komoditi unggulan yakni ikan nila dan patin dengan banyaknya pembudidaya di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan salah satunya Kabupaten Musi Rawas (Heirina *et al.*, 2022).

## PEMBAHASAN

Sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan diharapkan mampu menyediakan bahan pangan (protein hewani) bagi masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan nelayan, membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah (Septifitri *et al.*, 2010).

Nurkamil (2015) pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan perlu dijadikan arus utama pembangunan nasional baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa alasannya: (1) Indonesia, termasuk Sumatera Selatan memiliki sumberdaya perikanan yang melimpah, baik secara kualitas maupun kuantitas; (2) industry perikanan memiliki keterkaitan yang kuat dengan perekonomian dan lainnya; (3) sumberdaya perikanan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif ini dapat bertahan lama asal dapat dikelola secara berkelanjutan; (4) aspek politik, stabilitas politik dalam dan luar negeri dapat dicapai jika kita berdaulat dalam hal perairan khususnya kelautan dan (5) sisi sosial dan budaya, hal ini merupakan kembalinya aspek kehidupan yang pernah dominan yang ada pada budaya Indonesia, yaitu maritim.

Nilai *Pearson Correlation* pada Inflasi terhadap PDRB negatif, yaitu -0,903. Nilai negatif tersebut mengartikan bahwa Inflasi yang terjadi berkorelasi negatif terhadap PDRB sektor Perikanan. Nanga (2005) inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong rendah, pengusaha akan berusaha menambah produksi karena inflasi yang rendah dapat meningkatkan semangat kerja produsen dari naiknya harga yang mana masih dapat dijangkau. Keinginan perusahaan untuk meningkatkan produksi tentu juga diimbangi dengan penambahan beberapa faktor produksi seperti tenaga kerja. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan pada akhirnya mendorong peningkatan PDRB. Namun, peningkatan PDRB seharusnya diimbangi dengan peningkatan nilai tukar nelayan/pekerja sektor perikanan yang dapat dilihat dari NTP sektor perikanan. Akan tetapi, Gambar 1 menunjukkan bahwa NTP sektor perikanan dari tahun 2014-2021 memiliki tren yang menurun.

Berbagai keanekaragaman hayati serta sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis tinggi, mendukung ekosistem perairan dan sebagai komponen penting pembangunan ekonomi (Ibrahim, 2007). Perhatian pemerintah harus semakin ditingkatkan terhadap sektor pertanian, baik segi pemberian modal dan juga pengelolaan sektor perikanan. Nilai tukar petani sektor perikanan yang memiliki tren turun mengindikasikan bahwa petani tidak memiliki pendapatan yang baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa produk domestik regional bruto sektor perikanan memberikan kontribusi 2,9% terhadap total PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat korelasi yang signifikan antara inflasi dengan nilai PDRB, namun tidak terdapat korelasi terhadap NTP.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama kegiatan pelaksanaan penelitian ini penulis memberikan ucapan terima kasih kepada Universitas Bina Insan atas dukungan yang telah diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [Kementerian PPN] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta (ID): Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. (2022). *Tabel Dinamis*. Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. <https://sumsel.bps.go.id/site/pilih>
- Fauzi, A. (2010). *Ekonomi Perikanan "Teori, Kebijakan dan Pengelolaan."* PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Field, A. (2009). *Discovering Statistics Using SPSS (Third Edition)*. California: SAGE Publisher.
- Hasoloan, J. (2019). *Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Masa Pemerintahan Jokowi-Jk 2016-2018*. [Thesis]. Bogor ID: Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Heirina, A., Rudiansyah, R., Murtini, S., Neksidin, N., Wulandari, D. R., Agustin, R., & Novita, Y. (2022). Strategi Pencegahan Kegagalan Panen Pada Budidaya Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) Studi Kasus Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Perikanan Unram*, 12(4), 555–564.
- Ibrahim, Y. (2007). Komunitas Pulau dalam Era Pembangunan: Terpinggir Atau Memingir? *J. Akademika*, 70(1), 57-76.
- KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan]. (2020). *Miliki Prospek Ekonomi Tinggi, KKP Maksimalkan Potensi Perikanan Budidaya di Sumatera Selatan*. [https://kkp.go.id/artikel/24565-miliki-prospek-ekonomi-tinggi-kkp maksimalkan-potensi-perikanan-budidaya-di-sumatera-selatan](https://kkp.go.id/artikel/24565-miliki-prospek-ekonomi-tinggi-kkp-maksimalkan-potensi-perikanan-budidaya-di-sumatera-selatan)
- Lenoir, R. (1974). *Les Exlus: Un Francais Sur Dix*. Paris: Seuil Publication.
- Marshelia, D., Sutrisno, J., & Ferichani, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Padi di Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten. *Jurnal AGRISTA*, 5(1), 163–172.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi Kedua*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Nirmala, A. R., Hanani, N., & Muhaimin, A. W. (2016). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Jombang. *Jurnal Habita*, 27(2), 66–71.
- Nurkamil, Y. (2015). *Peran Sektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Cianjur*. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015*

*Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.*  
Jakarta: Sekretariat Negara.

- Samosir, A. (2014). *Sektor Perikanan: PNBP yang Terabaikan*. [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/sektor\\_perikanan\\_060314.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/sektor_perikanan_060314.pdf). Septifitri. (2010). *Analisis Pengembangan Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Selatan*. [Disertasi]. Bogor: IPB University.
- Septifitri, S., Monintja, D. R., Wisudo, S. H., & Martasuganda, S. (2010). Peluang Pengembangan Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, 1(2), 81–93.
- Sholihah. (2014). *Pertumbuhan Inklusif: Faktor-Faktor yang Memengaruhi dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Kelas Menengah di Indonesia*. [Tesis]. Bogor ID: Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Sumantriyadi. (2014). Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Rawa Lebak Untuk Perikanan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan*, 9(1), 108–111.